PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

RINA SANTIKA
105731103319

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR

2023

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN :

PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh :

RINA SANTIKA
NIM : 105731103319

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya beserta kesulitan itu
ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
(untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau
berharap (Q.S. Al Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.
Alhamdulillahi Rabbil'Alamin

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta Yang telah memberikan segalanya untukku, berkorban, dan mendidikku dengan penuh kasih sayang sehingga saya bisa sampai di titik ini,Terima kasih untuk orang-orang yang saya sayang dan almamaterku

PESAN DAN KESAN

Jangan anggap diri terlalu kecil untuk menggapai kesuksesan, karena tidak ada yang tahu seberapa besar sebenarnya kekuatan yang anda miliki.

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411)866972 Makassar

بسم الله الرحمن الرحيم

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa)

Nama Mahasiswa : Rina Santika

No. Stambuk/ NIM : 105731103319

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 16 Juni 2023 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 10 Juli 2023

Menyetujui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Endang Winarsih, SE.,M.Ak	**Masrullah, SE.,M.Ak**
NIDN : 0913029101	**NIDN : 0923089201**

Mengetahui :

Dekan	Ketua Program Studi
Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si	**Mira, SE., M.Ak., Ak**
NBM : 651 507	**NBM : 1286 844**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

iv

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar

بسم الله الرحمن الرحيم

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Rina Santika, Nim: 105731103319 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/SK-Y/62201/091004/2023, Tanggal 2 Dzulqa'dah 1444 H /22 Mei 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2 Dzulqa'dah 1444 H
10 Juli 2023 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc. (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Amril, SE.,M.Si.,Ak.CA (.....)
   2. Endang Winarsih, SE.,M.Ak (.....)
   3. Asriani Hasan, SE.,M.Sc (.....)
   4. Sitti Zulaeha, S.Pd.,M.Si (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM : 651 507

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

v

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411)866972

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rina Santika
Stambuk	: 105731103319
Program Studi	: Akuntansi
Judul Skripsi	: Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 10 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL BF5AKX517134842

Rina Santika
NBM: 105731103319

Diketahui Oleh:

Dekan	Ketua Program Studi
Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.	**Mira, S.E., M.Ak.,Ak**
NBM:651 507	**NBM: 1283 844**

vi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rina Santika
NIM	: 105731103319
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ***(Nonexclusive Royalty Free Right)*** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 10 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
A2AAKX517134848

Rina Santika
NIM: 105731103319

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

vii

ABSTRAK

RINA SANTIKA.2023. *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa.* Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Endang Winarsih dan Masrullah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pada kantor Samsat kabupaten Gowa sebanyak 1.615 wajib pajak. Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan Teknik *non probability sampling*, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 93 wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang diolah menggunakan sistem SPSS ver.22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci : Administrasi Perpajakan, Kesadaran, Kepatuhan Pajak.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ABSTRACT

RINA SANTIKA. 2023. ***The Influence of Tax Administration Reform and Taxpayer Awareness of Motor Vehicle Taxpayer Compliance at the SAMSAT Office of Gowa Regency. Thesis. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by : Endang Winarsih and Masrullah*****.**

This study aims to determine the effect of tax administration reform and taxpayer awareness on motor vehicle tax compliance at the Gowa district Samsat office. This study uses a quantitative method with a descriptive approach. The population in this study were taxpayers at the Samsat office in Gowa district, with a total of 1,615 taxpayers. The data collection technique in this study used a non-probability sampling technique, so that a total sample of 93 taxpayers was obtained. The data analysis technique used in this study was multiple regression analysis which was processed using the SPSS ver.22 system. The results of this study indicate that tax administration reform and taxpayer awareness partially have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords : Tax Administration, Awareness, Tax Compliance.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Gowa"

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Kamran dan ibu Sanawati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Serta kakak saya Kasfila Sandra tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Andi Jam'an, SE.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE.,M.Ak Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Endang Winarsih, S.E., M.Ak selaku pembimbing I yang senantiasa yang meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi bisa selesai dengan baik.
5. Bapak Masrullah, SE.,M.Ak selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu dan meluangkan waktunya selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal Lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2019 yang selalu belajar Bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabatku Risdayanti, Trisnawati, Wilda Damayanti, Salsabila Sukara, untuk semua cerita yang kita lewati selama menjalani proses Pendidikan di bangku perkuliahan dan juga senantiasa membersamai dan meluangkan waktu untuk membantu, selalu memberikan saran, serta selalu memberikan semangat.

10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang Budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikannya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 17 Juli 2023

Rina Santika

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

SURAT PERNYATAAN ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

ABSTRAC ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

DAFTAR TABEL ..... **xvi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**

A. Tinjauan Teori 8

1. Dasar-dasar Pajak 8

2. Pajak Kendaraan Bermotor 14

3. Reformasi Administrasi Perpajakan 17

4. Kesadaran Wajib Pajak 19

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

5. Kepatuhan Wajib Pajak 21
B. Penelitian Terdahulu 23
C. Kerangka Pikir 34
D. Hipotesis 36
BAB III METODE PENELITIAN 38
A. Jenis Penelitian 38
B. Lokasi dan waktu penelitian 39
C. Jenis Dan Sumber Data 39
D. Populasi Dan Sampel 40
E. Teknik Pengumpulan Data 41
F. Definisi Operasional Variabel 43
G. Metode Analisis Data 44
H. Uji Hipotesis 48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 50
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 60
1. Hasil Uji Instrumen 61
2. Uji Asumsi Klasik 62
3. Analisis Regresi Berganda 65
4. Uji Hipotesis 66
C. Pembahasan Penelitian 68
BAB V PENUTUP 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 71
DAFTAR PUSTAKA 72

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LAMPIRAN 75

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR TABEL

Nomor Keterangan Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Membayar Pajak Di Samsat Kabupaten Gowa Tahun 2018-2021 5

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....24

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas 61

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas 62

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 63

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolineritas.....64

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 65

Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Berganda 65

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Parsial (Uji T).....67

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....68

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR GAMBAR

Nomor Keterangan Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 35

Gambar 4.1 Struktur Organisasi SAMSAT Gowa 54

Gambar 4.2 Grafik Hasil Uji Normalitas..... 63

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 76
Lampiran 2 79
Lampiran 3 83
Lampiran 4 87
Lampiran 5 88
Lampiran 6 89
Lampiran 7 92
Lampiran 8 93
Lampiran 9 94
Lampiran 10 95
Lampiran 11 96
Lampiran 12 97

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum maupun bidang Pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan keadilan dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Menurut (Laila Fatikhatul Ula, 2020) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Monalika, 2020) Pengelolaan pajak di Indonesia berkembang dengan dinamis melalui perubahan seperti organisasi, sistem, sarana dan prasarana kerja, peraturan maupun aparat yang mengelola pajak, telah memberikan kontribusi yang meningkat bagi penerimaan negara. Pajak merupakan faktor penting dalam perekonomian setiap negeri dan hal ini juga berlaku untuk Indonesia. Pajak digunakan tidak hanya sebagai alat pembiayaan untuk mencapai tujuan ini, tetapi juga sebagai alat fiskal yang efektif dan efisien untuk memandu kebijakan ekonomi.

Menurut (Isnaini & Karim, 2021) Dalam perkembangannya pajak memiliki peran yang penting guna membangun dan memfasilitasi daerahnya

masing-masing mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat daerah. Tanpa adanya kontribusi pajak dalam suatu daerah maka daerah tersebut sulit untuk berkembang karena perkembangan tersebut salah satunya didapat melalui kontribusi pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak dalam daerah tersebut. Pengenaan pajak di Indonesia berdasarkan tingkat pemerintahannya (lembaga pemungut). Dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Juvita Dwi Herawati, Shandy Marsono (2020) dengan judul penelitian "pengaruh reformasi administrasi perpajakan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada samsat klaten)" dengan menggunakan metode kualitatif, yang menunjukkan hasil bahwa variable Reformasi administrasi berpengaruh baik tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pengetahuan wajib pajak berpengaruh netral atau tidak signifikan. Penelitian juga dilakukan oleh Putri Isnaini dan Abdul Karim (2021) yang berjudul "pengaruh reformasi administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada kantor samsat kabupaten gowa)" dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer, yang menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kantor Samsat Kabupaten Gowa.

Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam usaha peningkatan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan khususnya di wilayah penelitian.

Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal lainnya :

1. penulis melakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Penelitian sebelumnya Juvita Dwi Herawati dan Shandy Marsono (2020). Melakukan penelitian di kantor samsat klaten. Sedangkan penelitian ini berlokasi di kantor samsat gowa.

Peneliti menjadikan Kantor Samsat Gowa sebagai objek atau tempat penelitian, karena Kantor Samsat Gowa merupakan kerangka kerja sama yang melibatkan polri, PT. Asuransi jasa Raharja, dan (BAPENDA) (Badan Pendapatan Daerah). Pendirian kantor Bersama SAMSAT yang meliputi ketiga organisasi tersebut dilakukan dalam rangka memfasilitasi dan memperlancar kegiatan masyarakat yang dilakukan dalam satu atap Gedung. Cara yang awalnya diberlakukan ini mengharuskan wajib pajak (PKB) (Pajak Kendaraan bermotor) untuk memeriksa pajaknya dan membayarnya secara langsung di kantor Gabungan SAMSAT. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem perpajakan yang lebih maju diberlakukan, dan wajib pajak tidak lagi diharuskan membayar pajak PKB di kantor Bersama SAMSAT. Mempermudah pembayaran PKB bagi wajib pajak, kantor Bersama samsat gowa memperbarui sistem perpajakan. E-SAMSAT, mobile samsat, drive thru

samsat, Lorong samsat, samsat care, simpatik operasional, took samsat, dan gerai samsat adalah contoh sistem perpajakan kontemporer. Perkembangan teknologi informasi dimanfaatkan untuk membangun sistem perpajakan modern berbasis e-samsat. (BPK, 2005) tentang penyelenggaraan sistem administrasi tunggal satu atap menjadi inspirasi pengembangan e-samsat. Diharapkan wajib pajak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya pelayanan yang ditawarkan dalam rangka membayar pajaknya. Penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari situasi saat ini yang mana banyak masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Hal ini disebabkan karena mudahnya masyarakat dalam memperoleh kendaraan bermotor yang diinginkan dengan sistem kredit. Penghasilan pajak daerah dapat meningkat dengan meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor melalui pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh masyarakat.

Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa ada peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Serta dibarengi dengan jumlah masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotornya. pada penelitian yang terjadi di kantor SAMSAT GOWA diperoleh dari jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak untuk tahun 2018-2021 yang dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1

Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Membayar Pajak

di Kantor Samsat Gowa Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Membayar Pajak	%
2018	286.373	129.911	45,36
2019	310.46	133.419	42,97
2020	337.507	117.12	34,7
2021	367462	122.922	33,45

Sumber :Kantor SAMSAT kabupaten Gowa, 2023

Berdasarkan Tabel tersebut menunjukkan bahwa persentase jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor turun setiap tahunnya.. Tentunya banyak hal yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Salah satunya yaitu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Meskipun Kabupaten Gowa merupakan Daerah termaju setelah Makassar, namun masih banyak yang tidak melakukan daftar ulang pajak kendaraan bermotor (melakukan penunggakan).

Hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah reformasi administrasi perpajakan. Bertujuan bahwa administrasi perpajakan yang ada di suatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal. Penerimaan pendapatan pajak juga dapat berlangsung secara maksimal apabila didukung oleh tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Kesadaran

perpajakan timbul dalam itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gowa".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT GOWA?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT GOWA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT GOWA.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT GOWA.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diharapkan akan memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini berpotensi untuk memberikan kontribusi terhadap disiplin akuntansi khususnya penelitian tentang dampak reformasi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Gowa, serta memperkuat hasil penelitian sebelumnya, serta membantu mahasiswa, khususnya. bermanfaat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa akuntansi. Penelitian lebih lanjut akan digunakan.

2. Manfaat rasional

Secara efisien penelitian ini diharapkan bersignifikan serta menjadi masukan bagi instansi terkait serta Kantor Samsat Gowa mengenai reformasi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak serta dapat meningkatkan kinerja aparat pajak khususnya dalam memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern. Kemudian, Bagi masyarakat umum diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan kepada aparat pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Dasar-dasar pajak

a) Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penting pendapatan pemerintah, bersama dengan pendapatan lainnya, yaitu pendapatan minyak dan gas dan pendapatan pemerintah non-keuangan. (BPK, 2007), pajak wajib dibayar oleh semua warga negara, baik sebagai perorangan maupun badan hukum, kepada pemerintah. Pajak ini diwajibkan oleh undang-undang, tidak diberikan kepada warga secara langsung, dan justru digunakan untuk keuntungan mereka.

Menurut (Resmi, 2019:1), menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi keuangan langsung warga negara ke kas negara sesuai dengan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan dengan tidak adanya layanan timbal balik (kontra prestasi), yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk menutupi pengeluaran publik.

Menurut (Purnomo, 2022:5), menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan wajib oleh pemerintah atau iuran wajib dari setiap warga negara yang dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan

undang-undang yang berlaku untuk kepentingan rakyat banyak. bahkan tanpa kontraprestasi langsung.

b) Fungsi Pajak

Menurut (Asri, 2021:52-54), menyatakan terdapat empat fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

   Fungsi Anggaran yaitu untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-sebanyak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

   Pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun politik dengan tujuan tertentu.

3. Fungsi demokrasi

   Fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

   Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

c) Jenis Pajak

menurut (Atmoko, 2022:7-8), Menyatakan bahwa Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Menurut Golongannya

a. Pajak langsung (*Direct tax)*

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak secara teratur sesuai dengan keputusan (SKP) yang dibuat oleh kantor pajak. (Surat ketetapan pajak) (SKP) intinya menyatakan berapa besar pajak yang harus dibayar orang tersebut. Wajib pajak harus menanggung biaya pajak langsung. Hal ini disebabkan, tidak seperti pajak tidak langsung, beban pajak ini tidak dapat dibebankan kepada pihak ketiga. Pajak langsung meliputi pajak penghasilan dan (PBB) (Pajak bumi dan bangunan).

b. Pajak tidak langsung (*indirect tax*)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya diterapkan pada wajib pajak dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara teratur, sebaliknya mereka hanya dapat dikumpulkan Ketika perbuatan atau kejadian tertentu menimbulkan kebutuhan untuk membayar pajak. Pajak penjualan atas produk mahal merupakan ilustrasi dari pajak tidak langsung. Jika wajib pajak menjual produk mahal, pajak ini dapat dikenakan.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya didasarkan pada subjek (orang) dan di mana keadaan pajak dapat mengubah

jumlah yang harus dibayar disebut sebagai subjektif. Contohnya termasuk pajak kekayaan dan pendapatan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya tergantung pada objeknya dikatakan objektif. Contohnya antara lain pajak tanah, pajak bumi dan bangunan, bea masuk, bea meterai, dan pajak atas impor kendaraan bermotor.

3. Menurut Pemungutnya

a. Pajak negara (pusat)

Pajak negara adalah pajak negara dipungut dan dipungut oleh aparatur pemerintah Indonesia, khususnya direktorat jenderal pajak dan kantor pemeriksa pajak. Bukan direktur jenderal bea dan cukai. Contohnya termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang-barang kelas atas, pajak property, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan bea materai.

b. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah (daerah), baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II, dipungut oleh pemerintah daerah dan hanya berlaku untuk penduduk setempat. Misalnya, ada pajak radio, televisi, hotel, restoran, hiburan, dan sarang burung.

d) Tata cara pemungutan pajak

Menurut (Suastika, 2021), Tata cara pemungutan pajak merupakan cara yang ditempuh oleh fiskus (pemerintah) dalam memungut pajak sehingga pajak dapat dipungut sebaik-baiknya untuk memenuhi kas negara dengan

memperhatikan efisiensi, efektifitas, kesederhanaan, keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Adapun tata cara pemungutan pajak yaitu:

1. Equality (Persamaan)

   Pemungutan pajak harus adil dan merata, artinya pajak yang dikenakan terhadap rakyat harus sebanding dengan kemampuan mereka untuk membayar dan keuntungan yang mereka terima. Adil menunjukkan bahwa setiap wajib pajak memberikan kontribusi yang adil terhadap anggaran, sesuai dengan kepentingannya dan keuntungan yang dicari.

2. Certainty (Kepastian)

   Perhitungan pajak tidak dilakukan sembarangan. Oleh karena itu, jumlah pajak yang terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu penyerahan semuanya harus diketahui oleh Wajib Pajak secara jelas dan tidak ambigu.

3. Convenience (Kenyamanan)

   Pajak harus dibayar oleh wajib pajak, idealnya pada saat melakukannya tidak memberatkan mereka, seperti ketika mereka sedang mencari uang. Pay as You Earn adalah nama dari prosedur pemungutan pajak ini.

4. Economy (Ekonomi)

   Secara ekonomi, beban wajib pajak serta biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak diantisipasi serendah mungkin. Menurut (Hakim, 2022), Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

a. *Official assessment system*

Pemerintah (petugas pajak) diberdayakan oleh sistem pemungutan pajak ini untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Setelah reformasi pajak tahun 1984, sistem pemungutan pajak ini tidak berfungsi lagi. Berikut adalah ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak ini:

1). Petugas pajak menentukan jumlah pajak yang terutang.

2). Wajib pajak tidak berbuat banyak.

3). Pajak menjadi terutang setelah fiskus menetapkan besarnya pajak terutang dan menerbitkan (Surat Ketetapan Pajak) (SKP).

b. *Self assessment system*

Pendekatan pemungutan pajak ini memungkinkan pembayar pajak kebebasan untuk menentukan kewajiban pajaknya sendiri dan membayar sendiri pajak yang telah jatuh tempo. Berikut ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini:

1). Pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak.

2). Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar.

3). Pemerintah tidak perlu mengeluarkan (Surat ketetapan pajak) (SKP) setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

c. *With Holding System*

Kewajiban pajak wajib pajak dapat dipotong dan ditagih oleh pihak lain atau pihak ketiga berdasarkan skema pemungutan pajak ini. Selain pemerintah dan pembayar pajak, pihak ketiga adalah mereka yang berada dalam situasi ini.

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a) Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Dhiwanggi & Herawati, 2022) Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu sendiri adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor/mekanik, tidak termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel. jadi kendaraan bermotor adalah kendaraan yang berjalan di atas aspal dan tanah seperti mobil sedan, bus, truck, triler, pick up, kendaraan beroda tiga dan beroda dua dan sebagainya.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor diatur dalam UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengenaan pajak kendaraan bermotor memiliki tarif progresif yang ditentukan berdasar tingkat

kepemilikan wajib pajak. Pada setiap daerah memiliki kewenangan sendiri untuk menentukan berapa besar tarif kepemilikan pajak kendaraan bermotor dengan syarat tidak lebih dari tarif yang ada dalam ketentuan atau undang-undang yang berlaku.

Pada undang – undang nomor 28 tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak Bermotor yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 2,75% dengan rincian sebagai berikut menurut (Ahmad et al., 2021)

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%.
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua 2%, ketiga 2,25%, keempat 2,5% dan kelima 2,75% dikali PKB.
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah TNI/Polri, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% dikali dasar pengenaan PKB.
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%

b) Objek Pajak Kendaran Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pengertian Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan melalui kepemilikan dan

atau penguasa kendaraan di daerah provinsi yang bersangkutan (Fitri, 2021). Hal ini dikarenakan kendaraan bermotor tersebut ikut memiliki fasilitas jalan umum yang disediakan oleh pemerintah provinsi dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan tidak tercatat di provinsi tersebut. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar antara lain : forklift, bulldozer, wheel loader, log loader, skidder, shovel, motor grader, excavator, back how, vibrator, compactor, scraper, atau yang dipersamakan. Peraturan ini dapat dijumpai pada beberapa peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku.

c) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Fitri, 2021) Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi /badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor badan tersebut**.**

d) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib Pajak adalah setiap orang atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor atau kendaraan khusus atau alat-alat berat atau besar.

1. Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah :
   a. Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya.
   b. Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan.
   c. Ahli waris yaitu orang 305 atau badan yang ditunjuk dengan surat wasiat atau yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atau putusan pengadilan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. Wajib Pajak baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga bertanggung jawab terhadap pelunasan pajaknya.

e) Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor tersebut.

3. Reformasi Administrasi Perpajakan

Reformasi pajak pertama di Indonesia di proyeksi pada tahun 1983 dengan mengganti official assessment sistem dengan self assessment, dimana wajib pajak dipercayakan memenuhi kewajibannya sendiri dalam berpajak. Selanjutnya pada tahun 1994, reformasi administrasi perpajakan merupakan usaha untuk merespon kesejagatan daerah akan semakin erat. Perkembangan secara teknis di bidang perpajakan semakin mengurangi kesenjangan dengan praktik akuntansi ditambah dengan peraturan perpajakan yang lebih baik dan lebih komprehensif. Reformasi pajak baru dirancang oleh pemerintah pada tahun 2000, untuk mengubah organisasi badan pengadilan pajak menjadi badan peradilan yang independen dan tunduk pada sistem peradilan yang diawasi oleh Mahkamah Agung.

Menurut (Rahman, 2022:210), reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak (*tax policy)* yaitu regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi

perpajakan. Reformasi administrasi memiliki tujuan utama, *pertama,* untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya; *kedua,* untuk mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dan dari pajak setiap saat bisa diketahui; *ketiga,* untuk memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada wajib pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.

Tujuan utama reformasi administrasi adalah memberikan pelayanan kepada warga negara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, pengelolaan penerimaan pajak. Ini memastikan transparansi dan akuntabilitas pendapatan dan pengeluaran dana pajak setiap saat. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, khususnya bagi pemungut pajak, wajib pajak, atau wajib pajak masyarakat. Keempat, meningkatkan efisiensi operasional dan efisiensi pajak.

Secara keseluruhan, reformasi perpajakan yang komprehensif akan dilaksanakan dalam tiga bidang utamanya yang secara langsung mempengaruhi pilar perpajakan: eksekutif, regulasi, dan pengawasan. (1) domain administrasi terutama karena modernisasi administrasi perpajakan; (2) domain regulasi karena perubahan undang-undang perpajakan. (3) Membangun database perpajakan nasional di bidang pengawasan.Reformasi administrasi perpajakan mempunya dimensi yaitu

a) Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah komponen yang terkait dengan pola peran yang telah ditetapkan dan keterkaitan antar peran, pembagian tugas di

antara berbagai sub-unit, alokasi wewenang di antara posisi administrative, dan jaringan formal.

b) Prosedur Organisasi

Prosedur organisasi yaitu untuk membuat keputusan, memilih prestasi, berinteraksi dengan orang lain, dan memajukan karir seseorang. Sedangkan pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi didasarkan pada Tindakan organisasi yang rutin dilakukan.

c) Strategi Organisasi

Strategi organisasi dipandang sebagai rencana, sikap, dan Tindakan, yang difokuskan untuk memanfaatkan semua kondisi, factor, peluang, dan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dengan sukses dan aman disebut sebagai strategi organisasi. Seiring waktu, strategi berubah Ketika pola pengambilan keputusan yang relevan muncul.

d) Budaya Organisasi

Budaya organisasi yaitu sebuah sistem nilai dan keyakinan Bersama yang muncul dalam sebuah organisasi dan mempengaruhi bagaimana anggotanya berperilaku dikenal sebagai budaya organisasi. System makna kolektif yang membedakan satu organisasi dari yang lain disebut sebagai budaya organisasi.

4. Kesadaran Wajib Pajak

a) Pengertian kesadaran wajib pajak

Menurut (Herawati & Marsono, 2020), Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, maka tingkat

kesadaran wajib pajak semakin tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya

Menurut (Donofan & Afriyanti, 2021), Kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tulus ikhlas tanpa adanya imbalan. Kesadaran memperlihatkan komponen penting seperti pemahaman serta pengetahuan.

Berdasarkan beberapa teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sebuah kondisi wajib pajak melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan ikhlas tanpa adanya imbalan.

b) Faktor-faktor kesadaran wajib pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain adalah ada beberapa faktor internal yang membentuk perilaku kesadaran wajib pajak untuk patuh, antara lain:

1. Persepsi wajib pajak

   Wajib Pajak sadar akan tanggung jawabnya untuk membayar pajak. Jika masyarakat memiliki persepsi yang baik tentang perpajakan itu akan meningkat. Kesadaran wajib Pajak harus patuh membayar pajak yang berkaitan dengan persepsi, termasuk paradigma fungsi pajak untuk pembiayaan pembangunan, penggunaan pajak untuk penyediaan barang publik, serta keadilan dan kepastian hukum dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak

Kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang tidak memahami aturan perpajakan memiliki kecenderungan untuk tidak mematuhinya; namun, jika pemahaman peraturan perpajakan diperlukan, maka wajib pajak akan menyadari sepenuhnya konsekuensi dari kegagalan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Kondisi keuangan wajib pajak

Kepatuhan pajak dipengaruhi secara ekonomi oleh situasi keuangan. Kesehatan fiskal adalah keadaan keuangan pembayar pajak yang dibuktikan dengan pendapatan mereka. Saya setuju. Salah satu aspek yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dan kemauan untuk mengikuti undang-undang perpajakan adalah pendapatan mereka. Sementara pembayar pajak dengan pendapatan rendah biasanya bergumul dengan masalah uang dan lebih memilih untuk terlibat dalam ketidakpatuhan pajak, pembayar pajak dengan pendapatan tinggi cenderung melaporkan pajak mereka dengan jujur.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

a) Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Umum Bahasa Indonesia seperti dikutip oleh (Herawati & Marsono, 2020), Menyatakan bahwa kepatuhan berarti tunduk pada atau mematuhi peraturan atau ajaran. Dalam hal perpajakan, kepatuhan berarti mengikuti persyaratan dan prosedur yang diatur dalam undang-

undang perpajakan yang berlaku. khususnya kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan kebenarannya, diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat perpajakan yang menuntut partisipasi aktif wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

Menurut (Dhiwanggi & Herawati, 2022), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu perilaku yang mana wajib pajak tunduk, menepati, dan menunaikan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut (Hidayat & Maulana, 2022) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.

Berdasarkan beberapa teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu perilaku wajib pajak tunduk serta mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan menunaikan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

b) Faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Menurut (Wibowo et al., 2022) dalam menunaikan kewajiban pajaknya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya antara lain:

1. Pemahaman terhadap sistem Self Assessment yaitu :

a. Official assessment system, merupakan sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh fiskus (Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan Business Model kanvas).

b. Self assessment system, Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak.

c. Withholding system, Sistem pemungutan/pemotongan pajak yang mana besarnya pajak terutang / yang harus dibayar ditentukan oleh pihak ketiga.

c) Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak

1. Kepatuhan Material Kepatuhan Material merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua material perpajakan, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kepatuhan Formal Kepatuhan formal merupakan kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajak secara formal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tertuang di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 yang berisikan tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan.

B. Tinjauan Empiris/Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel (Kuantitatif)	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Juvita Dwi Herawati , Shandy Marsono Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 5, No 2 (2020)	Pengaruh reformasi administrasi perpajakan,kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada samsat klaten)	(X1) Reformasi administrasi perpajakan (X2) Kesadaran wajib pajak (X3) Sanksi pajak (Y) Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Uji instrumen data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji heterosked astisitas, uji normalitas dan uji autokorelasi, dan uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji R2 .	Menunjukkan bahwa variabel reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

No.	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel (Kuantitatif)	Alat Analisis	Hasil Penelitian
2.	Yanti Rufaedah, Fatmi Hadiani. Journal of Economics Vol.7 No.1 (2020)	Pengaruh reformasi administrasi perpajakan, kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kpp pratama se-bandung raya	(X1) Reformasi administrasi perpajakan (X2) Kualitas pelayanan (X3) Kesadaran wajib pajak (Y) Kepatuhan wajib pajak	Mengguna kan simple linear regression/ method dengan alat bantu spss 20,0	Menyatakan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

No.	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel (Kuantitatif)	Alat Analisis	Hasil Penelitian
3.	Citra Alamanda, Susi Dwi Mulyani jurnal Ekonomi dan Bisnis vol.7 No.3 (2020)	Pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi profesi dokter dengan preferensi risiko sebagai pemoderasi	(X1) Reformasi administrasi perpajakan (X2) Kualitas pelayanan fiskus (Y) Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Metode Structural Equation Modelling (SEM) atau yang lebih dikenal dengan Partial Least Square (PLS).	Menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi profesi dokter.sedangkan preferensi risiko memperlemah hubungan antara reformasi administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi profesi dokter.

No.	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel (Kuantitatif)	Alat Analisis	Hasil Penelitian
4.	Wilberth Aiwoy, Dr. Otniel Safkaur,SE., M.Si, dan Aaron M. A. Simanjuntak, SE., M.Si jurnal akuntansi dan keuangan daerah vol 16,No 1 (2021)	Pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (studi empiris pada kantor pelayanan pajak pratama jayapura)	(X1) reformasi administrasi perpajakan (X2) pengetahuan perpajakan (Y) tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak	Menggunakan alat analisis regresi linear berganda	Menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan PKP di KPP pratama Denpasar barat sebesar 11,5 persen dan sisanya 88,5 persen dipengaruhi oleh factor-faktor lain yang tidak masuk ke dalam model penelitian.

No.	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel (Kuantitatif)	Alat Analisis	Hasil Penelitian
5.	Putri Isnaini dan Abdul Karim jurnal keuangan dan perbankan, vol.3 No. 1 (2021)	Pengaruh reformasi administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada kantor samsat kabupaten gowa)	(X1) Reformasi administrasi perpajakan (X2) Kesadaran wajib pajak (X3) Sanksi Pajak (Y) Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Analisis Regresi linier berganda	Menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kantor samsat kabupaten gowa. Dengan demikian hasil ini diharapkan dapat bermanfaat dalam usaha peningkatan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan kesadaran wajib pajak

No.	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel (Kuantitatif)	Alat Analisis	Hasil Penelitian
					dan sanksi perpajakan khususnya di wilayah penelitian..
6.	Hani Putri Monalika, Haninun, jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman) Vol 1, No 2 (2020)	Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP pratama kedaton bandar lampung	(X1) Reformasi administrasi perpajakan (Y) Kepatuhan wajib pajak	Menggunakan regresi linear	Bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa adanya reformasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
7.	Imam Hidayat dan Lusiana Maulana jurnal for research in accounting vol.5 No.1 (2022)	Pengaruh reformasi administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas	(X1) Reformasi administrasi perpajakan (X2) Kesadaran wajib Pajak (X3) Sanksi pajak (X4) kualitas pelayanan pajak	Menggunakan metode survei	Menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran

No.	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel (Kuantitatif)	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota tangerang	(Y) Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor		wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kota Tangerang. Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kota Tangerang.
8.	Pebryan Indra Yudha, dan Ratih Hesty Utami jurnal riset ekonomi dan akuntansi vol 1 No.1 (2023)	Pengaruh Reformasi administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan	(X1) Reformasi administrasi perpajakan (X2) kesadaran wajib pajak (X3) kualitas pelayanan (X4) kewajiban moral (X5) sosialisasi pajak (Y) kepatuhan wajib pajak	Menggunakan persamaan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat bantu uji statistik IBM SPSS (Statistical Package for the Social	Menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

No.	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel (Kuantitatif)	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten pati	kendaraan bermotor di kabupaten pati	Sciences) Versi 26.	dengan nilai thitung 0,827 < ttabel 1,983 dengan nilai signifikansi 0,410 > 0,05. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai thitung 3,708 > ttabel 1,983 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai thitung 3,541 > ttabel 1,983 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai thitung 3,573 >

No.	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel (Kuantitatif)	Alat Analisis	Hasil Penelitian
					ttabel 1,983 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05.
9.	I Gusti Ayu Putu Erviana Dewi, Ni Putu Sri Harta Mimba jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.No. 3 (2020)	Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP Dengan Preferensi Risiko Sebagai Pemoderasi	(X1) reformasi administrasi perpajakan (X2) Tax amnesty (Y1) Kepatuhan WPOP (Y2) referensi risiko sebagai pemoderasi	Menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA).	Menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Preferensi risiko memperlemah hubungan antara reformasi administrasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan memperkuat hubungan

No.	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel (Kuantitatif)	Alat Analisis	Hasil Penelitian
					antara tax amnesty pada kepatuhan wajib pajak orang.
10.	Imara Ayu Dyachita Dhiwanggi Dan Tuban Drijah Herawati Jurnal ilmu administrasi publik Vol 1, no.5 (2021)	Pengaruh Reformasi administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan keadilan pajak selama pandemi covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi pada Kantor SAMSAT Kota Malang)	(X1) Reformasi administrasi perpajakan (X2) kesadaran wajib pajak (X3) Kualitas pelayanan (X4) Keadilan pajak selama pandemi covid-19 (Y) Efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan	Menggunakan metode statistik nonparametrik dengan menggunakan analisis regresi berganda.	Menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan keadilan pajak selama pandemi covid-19 berpengaruh positif dan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat menetapkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut. pajak adalah pungutan wajib oleh pemerintah atau iuran wajib dari setiap warga negara yang dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku untuk kepentingan rakyat banyak. bahkan tanpa kontraprestasi langsung.

kepatuhan wajib pajak adalah suatu perilaku yang mana wajib pajak tunduk, menepati, dan menunaikan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. khususnya kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan kebenarannya, diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat perpajakan yang menuntut partisipasi aktif wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

Proses organisasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana ditegaskan oleh pernyataan Soemitro, teori kepatuhan secara garis besar dapat dibagi menjadi teori penegakan dan teori konsensus. Menurut teori paksaan, orang menaati hukum karena adanya paksaan oleh penguasa terhadap kekuasaan hukum. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa paksaan fisik, monopoli kekuasaan, adalah dasar untuk menciptakan ketertiban, tujuan hukum. Sedangkan menurut teori konsensus, landasan hukumnya adalah undang-undang. Teori ini konsisten dengan upaya menuju kepatuhan sukarela wajib pajak.

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka dapat disusun ke dalam model penelitian yaitu :

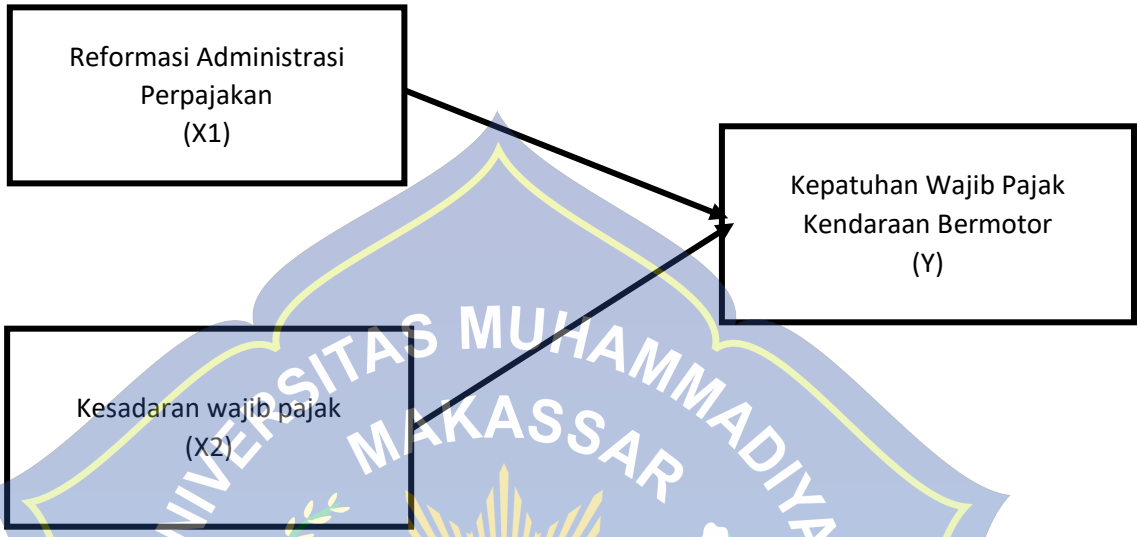

Gambar 2.1
Kerangka Pikir

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

D. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan tentatif atau pernyataan berdasarkan temuan atau teori penelitian lanjutan sebelumnya tentang masalah pertanyaan penelitian.. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

1. Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT GOWA

Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar efisien dan ekonomis dan cepat. Salah satu sasaran dari reformasi administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak. Kepatuhan wajib pajak akan berlanjut jika didukung dengan administrasi yang efektif. Tujuan administrasi pajak adalah membantu perkembangan kepatuhan pajak secara sukarela (Herawati & Marsono, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Hani Putri Monalika dan Haninun, 2020) dan (Imam Hidayat dan Lusiana Maulana, 2022), menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT GOWA

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya (Herawati & Marsono, 2020).

Kesadaran Wajib Pajak akan timbul jika wajib pajak telah memahami tentang arti dari pihak, manfaat dari pihak dan dampak jika tidak membayar pajak. Sesungguhnya factor pertama dari perilaku wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakan adalah kesadaran wajib pajak itu sendiri. Jika kesadaran akan pentingnya membayar pajak dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan maka akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Juvita Dwi Herawati dan Marsono, 2020) dan (Putri Isnaini dan Abdul Karim, 2021), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif merupakan kegiatan analisis penelitian di mana pada proses perhitungan menggunakan angka-angka. Pendekatan deskriptif digunakan untuk melihat pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor baik secara parsial maupun simultan pada kantor samsat Gowa. Bagian dari penelitian yang dilakukan harus memastikan populasi dan sampel terlebih dahulu. Pada penelitian kuantitatif posisinya harus bebas nilai atau "Value Free", oleh karena itu kaidah objektivitas sangatlah ketat diterapkan dalam penelitian (Veronica, 2022:7).

Penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan, berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi.

Menurut (Amruddin, 2022:15), penelitian kuantitatif adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan dengan memberi data berupa angka. Angka yang diperoleh digunakan untuk melakukan Analisa keterangan, sederhananya penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara sistematis terhadap bagian-bagian dan untuk menemukan kausalitas keterkaitan.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Gowa di Jl. Tumanurung Raya,Kalegowa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan berlangsung selama dua bulan, mulai Maret 2023 sampai dengan Mei 2023.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka atau data yang dapat dihitung dengan satuan bilangan. Dan menggunakan data numerik atau data yang diolah menggunakan perangkat lunak (SPSS) (Statistical Product and Service Solutions) dengan menggunakan analisis regresi berganda. Melalui pengujian hipotesis, hasil analisis regresi berganda akan menjelaskan hubungan antar variabel.

2. Sumber Data

Menurut (Masayu Rosyidah, 2021:74) sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. maka Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a). Sumber data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Menurut (Ahmad Luthfi & Sri Kasnelly, 2022:185) data primer adalah bisa peneliti langsung dapatkan dari objek riset. yang berasal dari langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dengan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

b). Sumber data sekunder

Menurut (Christina Bagenda, 2022:86) Data sekunder merupakan sumber bahan kajian yang digambarkan dari orang yang tidak ikut mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian berlangsung.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Menurut Ismiyanto dikutip dalam buku (Roflin, 2021:5), Mengemukakan Bahwa mengenai Populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi (data) penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 1.615 wajib pajak di kantor samsat gowa.

2. Sampel

Menurut (Pariyana, 2021:1-2), sampel merupakan bagian dari populasi. Kalimat ini mengandung dua pengertian, yaitu (1) setiap unit populasi harus memiliki peluang untuk diambil sebagai sampel, dan (2) sampel harus dapat mencerminkan populasinya atau representatif terhadap populasinya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel yang akan menjadi target penelitian. Rumus yang digunakan adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan (0.05)/5%

Berdasarkan rumus di atas, peneliti mendapatkan jumlah sampel yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

n =1.615/(1+(1.615×0.05))

n =1.615/(1+(1.615×0.025))

n =93 Responden

Pada pencarian menggunakan rumus slovin, dengan jumlah populasi 1.615 wajib pajak pada kantor samsat gowa dan batas toleransi kesalahan yang digunakan adalah 0.05, maka didapatkan jumlah sampel yang diperlukan dalam penelitian ini sebanyak 93 responden.

3. Teknik Sampling

Sampling adalah suatu cara pengumpulan data yang sifatnya tidak menyeluruh, yaitu tidak mencakup seluruh objek penelitian (populasi) akan tetapi Sebagian saja dari populasi. Menurut (Rusli Taher, 2022:33)Teknik pengambilan sampel atau Teknik sampling adalah Teknik pengambilan sampel dari populasi. Dalam penelitian ini Teknik sampling yang digunakan yaitu *non probability sampling*. *Non probability sampling* adalah Teknik yang tidak didasarkan atas hukum probabilitas sehingga tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (H. Ahmad Luthfi, Sri Kasnelly, 2022:91) Teknik pengumpulan data adalah Teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk

pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda,tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui:observasi wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain.Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Studi lapangan *(Field Research)*

   Peneliti lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan lapangan pada tempat yang menjadi objek, maksud dan tujuan dari penelitian.

2. Kuesioner (Daftar pertanyaan)

   Kuesioner adalah pengumpulan data dengan menyebarkan angket yang berisi daftar pertanyaan kepada responden dengan memilih alternatif jawaban yang tersedia. Dilakukan secara langsung/melalui pos, telepon atau alat komunikasi lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuesioner dengan skala likert.

3. Studi Kepustakaan (*Library Research)*

   Studi kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan teori-teori yang mendasari penelitian, yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan analisis terhadap data dan informasi yang didapatkan dari perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti mempelajari buku-buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

F. Definisi Operasional Variabel

1. Definisi Operasional

Peneliti menggunakan 2(dua) variabel penelitian yang menjadi acuan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a) Variabel Bebas (Independent Variabel)

Menurut (Surahman, 2020:58),variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang menjadi penyebab atau memiliki kemungkinan teoritis berdampak pada variabel lain. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah : Reformasi administrasi perpajakan dan pemeriksaan pajak.

1. Reformasi administrasi perpajakan (X1)

Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.

Menurut (Rahman, 2022:210), indikator yang terkait dengan reformasi administrasi perpajakan adalah sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi

b. Prosedur Organisasi

c. Strategi Organisasi

d. Budaya Organisasi

2. Kesadaran wajib Pajak (X2)

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

semakin tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya

b) Variabel Terikat (Dependent Variable)

Menurut (Dkk, 2020:305-306), Variabel terikat (Dependent Variabel) adalah variabel yang secara struktur berpikir keilmuan menjadi variabel yang disebabkan oleh adanya perubahan variabel lainnya. Variabel tak bebas ini menjadi *primary interest* atau persoalan pokok bagi si peneliti yang selanjutnya menjadi objek penelitian. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan, dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan sukarela.

G. Metode Analisis Data

pendekatan penelitian adalah penelitian kuantitatif maka analisis yang digunakan adalah :

1. Uji Kualitas Data

a). Uji Validitas Data

Uji validitas data bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pernyataan yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan. Uji validitas dapat dilihat dengan membandingkan nilai r-hitung dengan nilai rtabel (Puspasari & Puspita, 2022).

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dilakukan untuk memastikan

bahwa masing masing pertanyaan akan terklasifikasi. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan metode Corrected Item Total Correlation.

Hasil perhitungan r-hitung (Correlated Item Total Correlation) kemudian dikonsultasikan dengan r-tabel dengan taraf signifikan 0,05. Apabila r hitung (Correlated Item Total Correlation) > r tabel maka butir instrument dapat dikatakan valid, akan tetapi jika r-hitung (Correlated Item Total Correlation) < r-tabel maka dikatakan bahwa instrument tersebut tidak valid. Penyelesaian pengujian validitas menggunakan *program IBM SPSS Statistics Version 22.*

b). Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel (Sanaky, 2021).

Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empirik ditunjukan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukan dengan nilai alpha Cronbach (a) mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika ≥ 0.700.

Jika nilai alpha > 0.7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient reliability) sementara jika alpha > 0.80 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat.

Atau, ada pula yang memaknainya sebagai berikut: Jika alpha > 0.90 maka reliabilitas sempurna. Jika alpha antara 0.70 – 0.90 maka reliabilitas tinggi. Jika alpha 0.50 – 0.70 maka reliabilitas moderat. Jika alpha < 0.50 maka reliabilitas rendah. Jika alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas yang secara rinci data dijelaskan sebagai berikut:

a). Uji Normalitas

Menurut (Mulyadi, 2020) tujuan uji normalitas adalah sebagai berikut :"Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian variabel lainnya dengan memperkirakan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistic parametrik tidak dapat digunakan. Penelitian ini menggunakan Kolmogorov-smirnov. Jika nilai Kolmogorov-Smirnov > 0,05 berarti data terdistribusi normal.

b). Uji Multikolinieritas

Menurut (Hidayat & Maulana, 2022) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Untuk mendeteksi

ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF. Nilai cut-off yang umum digunakan adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan VIF diatas 10. Apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

c). Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara pengujian ada tidaknya heteroskedastisitas dapat bermacam-macam diantaranya uji Glejser. Kriteria pengujiannya dinilai signifikan dari variabel independen lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan jika nilai signifikan dari variabel independen lebih kecil dari 0,05 maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas (Hidayat & Maulana, 2022).

3. Analisis Regresi Berganda

Menurut (Padilah & Adam, 2019),analisis regresi berganda merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk menelusuri pola hubungan antara variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Analisis regresi berganda ialah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala pengukuran bersifat metrik, baik untuk variabel bebas maupun variabel tergantungnya (Jusuf, 2021).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Analisis regresi berganda dilakukan untuk memastikan seberapa besar variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Analisis regresi berganda adalah metode untuk menilai seberapa baik bekerja pemeriksaan reformasi administrasi perpajakan (X1),Kesadaran wajib pajak (X2), Pada kepatuhan wajib pajak (Y). Berikut ini penggunaan model persamaan regresi berganda sebagai dasar perhitungannya :

Persamaan umum regresi berganda adalah :

$$Y = \alpha + \beta 1\, X1 + \beta 2\, X2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

X1 = Reformasi Administrasi perpajakan

X2 = Kesadaran wajib pajak

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

e = Koefisien error

H. Uji Hipotesis

Peneliti melakukan penelitian dengan menguji hipotesis mengenai pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan tinjauan kepatuhan pajak bagi wajib pajak, digunakan pengujian hipotesis dengan Uji t, Uji F, dan uji R^2, yaitu:

1. Uji Koefisien Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Anggraeni, 2022). Untuk melihat hasil uji t, bandingkan nilai signifikan (Sig) dengan tingkat kepercayaan yang diperlukan (α), 0,05, atau bandingkan nilai hitung

dan tabel. Untuk menentukan nilai t-tabel ditentukan dengan tingkat signifikan 5% dengan derajat kebebasan df = (n-k-1) dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

Jika t hitung > t tabel, maka HO diterima dan H_o ditolak yang berarti bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika t hitung < t tabel, maka H_a ditolak dan H_o diterima yang berarti bahwa variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^{2)}$

Koefisien determinasi mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen dalam model regresi (Anggraeni, 2022). Jika, nilai $R2$ mendekati satu maka kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sangat baik. Sebaliknya, jika nilai $R2$ mendekati nol maka kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen tidak baik atau model dianggap tidak praktis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Gowa

Kantor SAMSAT Gowa Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), atau dalam Bahasa Inggris One Roof System, adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

Contoh dari samsat adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor. Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat".

Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Lokasi Kantor Bersama Samsat umumnya berada di lingkungan Kantor Polri setempat, atau di lingkungan Satlantas/Ditlantas

Polda setempat. Samsat ada di masing-masing provinsi, serta memiliki unit pelayanan di setiap kabupaten/kota.

a). Sampai dengan tahun 1974

Proses perpanjang STNK harus membuang waktu cukup lama karena mesti mendatangi tiga kantor. Membayar pajak harus datang ke kantor pajak. Esoknya, mereka yang hendak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan harus mendatangi kantor. Dan mereka pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK. Masing-masing instansi belum terintegrasi.

b). Tahun 1974-1976

Dengan Tujuan Registrasi dan Identifikasi Forensik Ranmor dan data pengemudi lebih akurat, kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan uji coba pembentukan SAMSAT di Polda Metro Jaya.

c). Tahun 1976-1988

Berdasarkan INBERS 3 Menteri, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. KEP/13/XII/1976, No.KEP-1693/MK/IV/12/1976, 311 TAHUN 1976 bahwa Konsep SAMSAT diberlakukan di seluruh Indonesia Kepolisian RI, PT Jasa Raharja (Persero) & Dinas Pendapatan Provinsi bersama-sama. Meski demikian masing-masing instansi menerbitkan tanda bukti untuk setiap pelunasan kewajiban di SAMSAT.

d). Tahun 1988-1993

Berdasarkan INBERS, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. INS/03/X/1988, No. 5/IMK.013/1988, No. 13A Tahun 1988 dilakukan penyederhanaan dokumen yaitu · Formulir permohonan/pendaftaran STNK/Pajak/SWDKLLJ digabung jadi satu. Tanda Pelunasan Pembayaran SWDKLLJ PT Jasa Raharja (Persero)yang tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai pengganti polis Asuransi (sertifikat).

e). Tahun 1993-1999

Diberlakukan revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi 5 tahun namun setiap tahunnya melakukan pengesahan STNK berdasarkan INBERS Panglima Angkatan Bersenjata, Menkeu & Mendagri No. INS/02/II/1993, No. 01/IMK.01/1993, No.2A Tahun 1993. Mekanisme Perpanjangan STNK dibentuk 5 pokja (loket) untuk pelayanan.

f). Tahun 1999 sd. Sekarang

Berdasarkan INBERS Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. INS/03/M/X/1999, No. 6/IMK.014/1999, No. 29 Tahun 1999 menetapkan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi pelayanan dari 5 loket menjadi 2 loket. Pembayaran SWDKLLJ yang tertera pada SKPD berfungsi sebagai pengganti polis asuransi (sertifikat). Tanda Pelunasan dan Pengesahan digabung dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi cash register sebagai tanda bukti pembayaran.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Pada tahun 1997, berdasarkan peraturan daerah yang bernama

kepala kantor Dinas yang sekarang UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah). Sejak berdirinya UPTD SAMSAT GOWA pertama kali dibimbing oleh kepala seksi pelayanan samsat gowa, selanjutnya dalam perkembangannya berdasarkan peraturan daerah Sulawesi Selatan dipimpin oleh pejabat Eselon III yang mempunyai tugas yang besar dari sebelumnya.

Tugas utama UPTD wilayah Gowa adalah melaksanakan pemungutan pajak provinsi berupa: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air dan Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Minyak, dan Pajak Rokok. Kantor UPTD secara struktural dibawah naungan DINAS PENDAPATAN DAERAH Sulawesi Selatan.

2. Visi Misi Kantor SAMSAT Gowa

Adapun Visi Misi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Gowa adalah:

a. Visi

"Maksimalnya peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan, akuntabel, dan inovatif"

b. Misi

1). Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13 % pertahun dan total pendapatan daerah sekitar 10 % pertahun.

2). Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka member kualitas prima dalam pelayanan pajak.

3). Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab dan profesional dalam mengelola pendapatan daerah.

4). Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah transparan dan akuntabel.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan atau hubungan antar tiap bagian dan posisi dalam suatu organisasi yang menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja, fungsi serta tanggung jawab pada organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan organisasi tersebut. Pembagian struktur organisasi di kantor SAMSAT Kabupaten Gowa dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Struktur Organisasi Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa

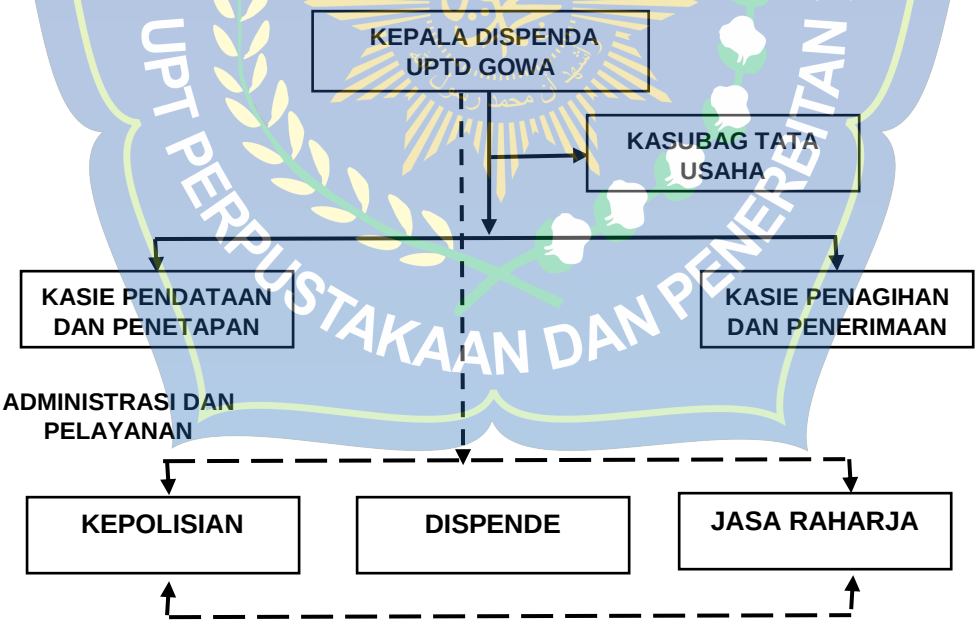

KETERANGAN

Garis Komando ——→

Garis Koordinasi - - - →

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi SAMSAT Gowa

Sumber : Kasubag Tata Usaha SAMSAT Kabupaten Gowa

Gambar tersebut adalah bagan struktur organisasi Dispenda UPTD pada Samsat Gowa. Dimana terdapat tiga kepala seksi Dispenda yaitu Kasubag Tata Usaha, Kasie Pendataan dan Penetapan, serta Kasi Penagihan dan Penerimaan yang dapat dikomandoi oleh Kepala Dispenda UPTD Gowa. Selanjutnya pada Administrasi dan Pelayanan atau yang biasa disebut AdPel terdapat tiga instansi yaitu Kepolisian, Dispenda, dan Jasa Raharja yang hanya bisa dikoordinasi oleh Kepala Dispenda UPTD Gowa.

4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan melalui Sekretaris Daerah. Dalam hubungan tersebut, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang pendapatan daerah sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku, dengan fungsi-fungsinya

yaitu :

a) Menyusun kebijaksanaan teknis di bidang Pendapatan.
b) Melaksanakan pelayanan umum Lintas Kabupaten/Kota di bidang
c) pendapatan.
d) Melaksanakan pembinaan teknis di bidang pendapatan.
e) Melaksanakan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

f) Pangelolaan urusan Tata Usaha Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana disebutkan di atas, maka Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan sebagai barikut:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang Pendapatan.
2. Pelatihan di bidang Pendapatan,
3. Alokasi sumber daya potensial,
4. Penelitian yang mencakup wilayah provinsi di bidang pendapatan,
5. Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja,
6. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah,
7. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan Daerah,
8. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang— Undangan.

Berikut tugas pokok kepegawaian SAMSAT Gowa yaitu :

1. Kepala UPTD

a) Memimpin dan mengendalikan seluruh operasi organisasi.

b) Menetapkan kebijaksanaan dari rencana-rencana organisasi dan mengambil keputusan dalam memimpin organisasi.

c) Bertanggung jawab terhadap urusan yang ada hubungannya dengan kegiatan organisasi.

d) Mengkoordinir dan mengawasi segala pelaksanaan operasional organisasi.

e) Mengkoordinir Kepala Kepolisian dan Kepala Jasa Raharja dalam pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Kasi Penagihan Dan Penerimaan

a) Melakukan penagihan dan penerimaan pajak Daerah retribusi Daerah dan pendapatan lain;

b) Menyiapkan surat penagihan teguran terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu;

c) Memberikan informasi mengenai tata cara pemungutan dan aturan yang terkait dengan pemungutan pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

d) Melakukan tugas operasional pemeriksaan pelunasan PKB dan BBNKB di jalan raya bekerjasama dengan instansi terkait;

e) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Kasi Pendataan dan Penetapan

a) Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penelitian dan verifikasi Pendapatan Pajak Daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

b) Menyampaikan surat ketetapan kepada wajib pajak dan retribusi;

c) Menyelenggarakan Inventarisasi data potensi obyek dan subyek pajak daerah, penetapan dan penginventarisasian wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu;

d) Melaksanakan administrasi pendataan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;

e) Pengoordinasian pengoperasian sistem pengelolaan data elektronik;

f) Menata usahakan arsip penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)

g) Membuat laporan hasil pendataan dan penetapan setiap bulannya

h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Staf Tata Usaha

a) Mengadministrasikan Persuratan;

b) Mempersiapkan berkas-berkas Kepegawaian

c) Melakukan pinata usahaan Inventaris Kantor

d) Membuat Laporan Inventaris Barang

5. Pembantu Bendahara Penerimaan

a) Melaksanakan pencatatan/ pembukuan harian (setiap hari)

b) Menerima setoran harian dari kasir

c) Membayarkan setoran harian dari kasir ke bank SULSEL yang dilakukan setiap hari

d) Membuat laporan bulanan.

6. Administrasi dan Pelayanan

Pada bidang Administrasi dan Pelayanan (AdPel) terdapat rincian tugas pokok ke 3 (tiga) unsur, yaitu Dispenda, Polri dan PT. Jasa Raharja (Persero), dilihat dari kewajiban mereka melayani permohonan pembuatan STNK menurut masing-masing pokja/loket adalah sebagai berikut :

a) Pokja I/Loket I (Polri, Dispenda, PT. Jasa Raharja (Persero))

Polri,bertugas menyediakan dan menyerahkan formulir,memberikan penerangan tentang syarat-syarat pendaftaran, membukukan keluar/masuk

suatu formulir, memberikan paraf pada formulir, terima dan ganti formulir, menerima biaya administrasi STNK, TNKB, dan nota cepat phisik. Dispenda, bertugas memberikan penerangan tentang kewajiban membayar pajak. PT. Jasa Raharja (Persero), bertugas memberikan penerangan SWDKLLJ dan premi asuransi, pemeriksaan premi asuransi Jasa Raharja.

b) Pokja II/Loket II (Polri)

Polri, bertugas melakukan cek fisik lengkap, mengamankan dan menugaskan tim pemeriksa, membubuhkan paraf pada lembar cek phisik dan registrasi kendaraan bermotor yang telah melakukan cek phisik.

c) Pokja III/Loket III (Polri, Dispenda, PT. Jasa Raharja (Persero))

Polri, bertugas menerima dan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas, memberikan paraf dan resi pada pemohon, memberikan dan menetapkan No. Pol. serta menuliskannya dalam formulir, meneruskan berkas ke sub pokok pengetikan notice/STNK dan mengorder TNKB ke pabrik TNKB. Dispenda, bertugas menetapkan besarnya PKB dan BBN-KB, memberi No. Skum pada nota pajak atau notice, meneruskan berkas ke sub pokja SWDKLLJ dan menerima kembali berkas tersebut, menyerahkan pening PKB ke pokja penyerahan STNK (Pokja V).

PT. Jasa Raharja (Persero), bertugas menetapkan SWDKLLJ atau denda serta paraf pada nota pajak, mengembalikan berkas ke sub pokja penetapan PKB dan BBN-KB.

d) Pokja IV/Loket IV (Dispenda, PT. Jasa Raharja (Persero))

Dispenda, bertugas melayani penerimaan pembayaran PKB,BBN-KB, SWDKLLJ dan administrasi STNK, menyerahkan lembar asli nota/notice, mendistribusikan tindasan nota ke Dispenda dan Jasa Raharja.

PT. Jasa Raharja (Persero), menerima dan mengadministrasikan SWDKLLJ

e) Pokja V/Loket V (Polri, Dispenda dan PT. Jasa Raharja (Persero))

Polri, bertugas melaksanakan penyerahan STNK yang akan diketik, menyerahkan STNK ke pokja penyerahan. Ketiga pimpinan instansi (Dispenda, Polri dan PT. Jasa Raharja (Persero) memberikan pengesahan pada STNK, bukti pembayaran pajak dan asuransi (Surat Ketetapan Pajak Daerah-SKPD) PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ. Dispenda, memberikan pengesahan pada STNK. Sedangkan PT. Jasa Raharja (Persero), memberikan pengesahan pada STNK.

f) Pokja VI/Loket VI (Polri)

Polri, bertugas menerima berkas dari Pokja V dan meneruskannya ke petugas Pokja VI. Pokja VI menyiapkan dan mencari berkas yang diminta pokja pendaftaran, menatausahakan berkas untuk memudahkan pencarian, membukukan dan mencatat berkas yang diterima dan yang keluar, menandai dan menyisihkan berkas yang diblokir.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 1.615 orang yang diperoleh dengan metode non probability sampling. Non probability sampling adalah Teknik yang tidak didasarkan atas hukum probabilitas sehingga tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Rusli Taher, 2022). Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor. Dari 1.615 sampel yang digunakan, peneliti mendapat 93 responden yang cocok

dijadikan sebagai sampel. Sehingga kuesioner yang dapat digunakan sebanyak 93 kuesioner.

a). Hasil Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Ketentuan suatu instrumen dikatakan valid apabila memiliki koefisien *pearson correlation* > 0,2039 (Puspasari & Puspita, 2022). Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Hasil Uji Validitas

Item Pernyataan	Pearson Correlation	Signifikan	Keterangan
X1			
X1.1	0,814	0,000	Valid
X1.2	0,826	0,000	Valid
X1.3	0,770	0,000	Valid
X1.4	0,733	0,000	Valid
X1.5	0,804	0,000	Valid
X2			
X2.1	0,720	0,000	Valid
X2.2	0,747	0,000	Valid
X2.3	0,682	0,000	Valid
X2.4	0,711	0,000	Valid
Y			
Y.1	0,713	0,000	Valid
Y.2	0,766	0,000	Valid
Y.3	0,777	0,000	Valid
Y.4	0,585	0,000	Valid

Sumber :(data diolah SPSS Ver. 22, 2023)

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini mempunyai pearson correlation > 0,2039 dan signifikan < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator yang digunakan dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya untuk mengukur reliabel, apabila koefisien reliabilitas (a) sebesar 0,70 atau lebih (Sanaky, 2021). Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Reformasi Administrasi Perpajakan (X1)	0,905	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,827	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,835	Reliabel

Sumber :(data diolah SPSS Ver. 22, 2023)

Dari Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan yang berkaitan dengan variabel independen dan variabel dependen memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh data yang digunakan pada kuesioner dikatakan reliabel.

b). Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak (Mulyadi, 2020). Alat analisis yang digunakan uji ini adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji normalitas terjadi apabila hasil dari uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih dari 0,05. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters A[a,b]	Mean	-.0009876
	Std. Deviation	1.13279618
Most Extreme Differences	Absolute	0,069
	Positive	0,069
	Negative	- 0,060
Test Statistic		0,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200[c,d]

Sumber:(Data diolah SPSS Ver. 22, 2023)

Berdasarkan ketentuan dalam melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov*, data yang berdistribusi normal adalah data yang memiliki nilai signifikan atau probalitas lebih besar dari 0,05. Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai *Asymp Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 atau 0,200 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan merupakan data yang berdistribusi normal.

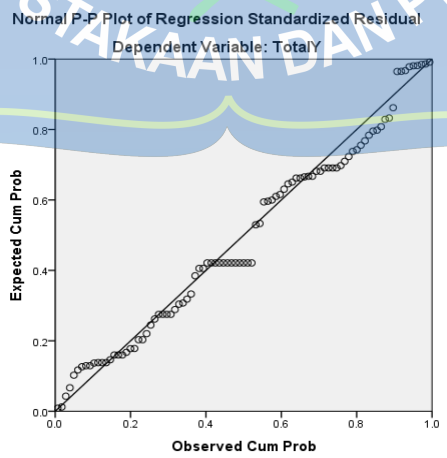

Gambar 4.2

Grafik Hasil Uji Normalitas (Uji P-Plot)

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, grafik tersebut menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah grafik diagonalnya. Oleh karena itu, data tersebut menunjukkan pola distribusi yang normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF. Nilai cut-off yang umum digunakan adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan VIF diatas 10. Apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi (Hidayat & Maulana, 2022). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4

Hasil Uji multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Reformasi Administrasi Perpajakan (X1)	0,484	2.066
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,484	2.066

Sumber:(Data diolah SPSS Ver. 22, 2023)

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji multikolinearitas pada semua variabel independent yang terdiri dari reformasi administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independent dalam model regresi ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara pengujian Uji Heteroskedastisitas jika nilai signifikan dari variabel independen lebih kecil dari 0,05 maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas (Hidayat & Maulana, 2022). Hasil . Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 4.5

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.100	0,570		1.930	0,057
	Reformasi Administrasi Perpajakan (X1)	-0,007	0,039	-0,029	-0,189	0,851
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	-0,005	0,042	-0,016	-0,108	0,915

Sumber: (Data diolah SPSS Ver. 22, 2023)

Berdasarkan pada tabel 4.5 di atas dapat dilihat pada kolom *Sig.* Bahwa nilai signifikan variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian memiliki nilai lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa syarat heteroskedastisitas lebih dipenuhi.

c) Analisis Regresi Berganda

Berikut hasil uji analisis regresi berganda menggunakan program computer *IBM SPSS Statistics Ver.22* :

Tabel 4.6

Hasil Uji Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.357	0,891		3.766	0,000
	Reformasi Administrasi Perpajakn (X1)	0,201	0,062	0,255	3.261	0,002
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,553	0,066	0,655	8.383	0,000

Sumber: (Data diolah SPSS Ver. 22, 2023)

Berdasarkan tabel di atas model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta 1\ X1 + \beta 2\ X2 + e$$

Kepatuhan Wajib Pajak = 3.357 + 0,201 X1 + 0,553 X2 + e

Nilai konstanta dan koefisien regresi pada tabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (*Constant)* = 3.357

   Konstanta *(Constant)* memiliki koefisien regresi sebesar 3.357. Hal ini berarti jika variabel-variabel bebas tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y adalah sebesar 3.357.

2. Variabel Reformasi Administrasi Perpajakan (X_1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,201. Hal ini berarti jika variabel Reformasi Administrasi Perpajakan meningkat sebesar 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,201%.

3. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) memiliki koefisien regresi sebesar 0.553. Hal ini berarti jika variabel Kesadaran Wajib Pajak meningkat sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak tidak mengalami peningkatan atau penurunan sebesar 0,553%.

d) Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Parsial (Uji T)

   Uji t digunakan untuk mengetahui secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian uji t adalah jika nilai signifikan menurut alpha yang telah ditentukan <0,05 maka dapat dikatakan signifikan (Anggraeni, 2022). Hasil Uji T dapat dilihat pada Tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel 4.7

Hasil Uji Koefisien Parsial (Uji T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.357	0,891		3.766	0,000
	Reformasi Administrasi Perpajakan (X1)	0,201	0,062	0,255	3.261	0,002
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,553	0,066	0,655	8.383	0,000

Sumber: (Data diolah SPSS Ver. 22, 2023)

Berdasarkan hasil Uji T diatas dapat dijelaskan bahwa :

a) Reformasi Administrasi Perpajakan (X_1) dengan nilai signifikan sebesar (0,002 < 0,05) dan nilai t-hitung > t-tabel (3,261 > 1,986) yang artinya hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini berarti bahwa reformasi administrasi perpajakan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

b) Kesadaran Wajib Pajak (X_2) dengan nilai signifikan sebesar (0,000 < 0,05) dan nilai t-hitung > t-tabel (8.383 > 1,986) yang artinya hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini berarti bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen dalam model regresi (Anggraeni, 2022). Jika, nilai $R2$ mendekati satu maka kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sangat baik. Sebaliknya, jika nilai $R2$ mendekati nol maka kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen tidak baik atau model dianggap tidak praktis. Hasil Uji Koefisien Determinasi dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini :

Tabel 4.8

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,857[a]	0,734	0,728	1.12329

sumber: (Data diolah SPSS Ver. 22, 2023)

berdasarkan pada tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,734 atau 73,4%. Hasil persentase ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 73,4%, sedangkan sisanya 26,6% dijelaskan oleh variabel lain yang pembahasannya tidak ada dalam penelitian ini.

2. Pembahasan

a) Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik, mudah dan terkendali sistem reformasi administrasi perpajakan maka wajib pajak menjadi patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. serta meningkatnya sosialisasi tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan kepada masyarakat luas, penyederhanaan prosedur dalam kegiatan pelayanan dan pemeriksaan yang tidak berbelit-belit atau tidak susah sehingga tidak menyita waktu cukup lama untuk wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Hani Putri Monalisa dan Ainun, 2020) dan (Imam Hidayat dan Lusiana Maulana, 2022), yang menyimpulkan bahwa Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan bertolak belakang dengan penelitian yang

dilakukan oleh (Putri Isnaini dan Abdul Karim, 2021), yang menyatakan bahwa Reformasi Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

b) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kesadaran wajib pajak mengenai pemahaman tentang pentingnya membayar pajak, serta tingginya kemauan wajib pajak membayar pajak, sehingga wajib pajak menjadi patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Juvita Dwi Herawati dan Marsono, 2020) dan (Putri Isnaini dan Abdul Karim, 2021), yang menyimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pebryan Indra Yudha, dan Ratih Hesty Utami, 2023), yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kesadaran Wajib Pajak akan timbul jika wajib pajak telah memahami tentang arti dari pihak, manfaat dari pihak dan dampak jika tidak membayar pajak. Sesungguhnya faktor pertama dari perilaku wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakan adalah kesadaran wajib pajak itu sendiri. Jika kesadaran akan pentingnya membayar pajak dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan maka akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka berikut adalah beberapa kesimpulan yang didapatkan:

1. Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik, mudah dan terkendali sistem reformasi administrasi perpajakan maka wajib pajak menjadi patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Serta meningkatnya sosialisasi tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan kepada masyarakat luas, serta penyederhanaan prosedur dalam kegiatan pelayanan dan pemeriksaan yang tidak berbelit-belit atau tidak susah sehingga tidak menyita waktu cukup lama untuk wajib pajak.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kesadaran wajib pajak mengenai pemahaman tentang pentingnya membayar pajak, serta tingginya kemauan wajib pajak membayar pajak, sehingga wajib pajak menjadi patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti akan memberikan saran yaitu:

1. Bagi Kantor SAMSAT Gowa

   Lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan petugas pajak dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan bertindak profesional dalam melayani wajib pajak. Dengan demikian diharapkan wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan model penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Serta menggunakan metode lain seperti wawancara sehingga mencerminkan keadaan responden yang sebenarnya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR PUSTAKA

Amruddin. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Media Sains Indonesia.

Anggraeni, Z. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Wajib Pajak*. *11*.

Asri, A. (2021). *Buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak*. CV Jejak.

Atmoko, D. (2022). *Regulasi Pajak Penghasilan Menelaah Hak Konsesi Jalan Tol Jorrs Pada Negara*. Cv Literasi Nusantara Abadi.

Bpk. (2005). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan*.

Bpk. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. In *Pravoslavie.Ru*.

Christina Bagenda. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Media Sains Indonesia.

Dhiwanggi, I. A. D., & Herawati, T. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Keadilan Pajak Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Ilmiah MAhasiswa FEB*, *10*(2).

Dkk, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu Group.

Donofan, I., & Afriyanti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *3*(4), 859–875. https://doi.org/10.24036/jea.v3i4.435

Fitri, F. (2021). Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pemeliharaan Dan Perluasan Jalan Di Kabupaten Purwakarta. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *8*(2), 297–314. https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.274

H. Ahmad Luthfi, Sri Kasnelly, A. H. (2022a). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Insan Cendekia Mandiri.

Hakim, L. (2022). *Regulasi Pajak Penghasilan Menelaah Hak Konsesi Jalan Tol Jorrs Pada Negara*. Cv Literasi Nusantara Abadi.

Herawati, J. D., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan,Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor. *Aktual: Jurnal Akuntansi* Dan

Keuangan, 5(2), 99–109. https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/aktual/article/view/776

Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, *5*(1), 11–35. https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322

Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *3*(1), 27 – 37. http://ejournals.umma.ac.id/index.php/pay

Jusuf, D. I. (2021). *Perilaku Konsumen di Masa Bisnis Online*. Penerbit Andi.

Laila Fatihah Al Ula. (2020). *Sistem Pelayanan Pajak*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.

Masayu Rosyidah. (2021). *Metode Penelitian*. Deepublish.

Megafury Apriandhini, Santi, Y., & Widhi, E. N. (2021). Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 di UPBJJ UT Samarinda. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, *1*(1), 75–83. https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1869.2021

Monalika, H. P. (2020). Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen*, *1*(2), 135–154. https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.13

Mulyadi, M. (2020). *Pengaruh Tenure Audit, Pergantian Auditor Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Report Lag*.

Padilah, T. N., & Adam, R. I. (2019). Analisis Regresi Linier Berganda Dalam Estimasi Produktivitas Tanaman Padi Di Kabupaten Karawang. *FIBONACCI: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Matematika*, *5*(2), 117. https://doi.org/10.24853/fbc.5.2.117-128

Pariyana. (2021). *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*. Penerbit Nem.

Purnomo. (2022). *Regulasi Pajak Penghasilan Menelaah Hak Konsesi Jalan Tol Jorrs Pada Negara*. Cv Literasi Nusantara Abadi.

Puspasari, H., & Puspita, W. (2022). Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Tingkat Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa terhadap Pemilihan Suplemen Kesehatan dalam Menghadapi Covid-19 Validity Test and Reliability Instrument Research Level Knowledge and Attitude of Students Towards. *Jurnal Kesehatan*, *13*, 65–71.

Rahman, A. (2022). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan*. Nuansa Cendekia.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan*. Salemba Empat.

Roflin, E. (2021). *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*. Penerbit Nem.

Rusli Taher, N. (2022). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Penerbit NEM.

Sanaky, M. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Man 1 Tulehu Maluku Tengah. *Jurnal Simetrik*, *11*(1), 432. https://doi.org/10.31959/js.v11i1.615

Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perspektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *7*(1), 326. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31686

Surahman. (2020). *Metode Penelitian*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Veronica, A. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Get Press.

Wibowo, A. S., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, *6*(2), 1304–1317. https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Assalamualaikum Wr.wb

Kepada Yth,

Saudara/i Responden

Di tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)"** sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Akuntansi Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Saya harap Saudara/i berkenan mengisi kuesioner yang saya lampirkan bersama surat ini. Ketersediaan serta kelengkapan dan kebenaran jawaban dari Saudara/i sangat saya harapkan, karena sangat menentukan keberhasilan penelitian yang saya lakukan. Data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan penelitian sehingga kerahasiaan dari jawaban kuesioner ini akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Atas perhatian dan ketersediaan Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

Petunjuk Pengisian :

1. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Ada 5 alternatif jawaban, yaitu :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Kurang Setuju (KS)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

1. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Alamat :

Pekerjaan :

No.	Keterangan	SS	S	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
Reformasi Administrasi Perpajakan (X1)						
1.	Menurut anda, petugas di kantor samsat telah melayani anda sesuai dengan prosedur.					
2.	Menurut anda, waktu pelayanan dan pemeriksaan pajak di kantor samsat sudah efisien dan efektif.					
3.	Menurut anda, pelayanan dan pemeriksaan pajak kendaraan telah sesuai dengan permintaan publik.					
4.	Menurut anda, petugas di kantor samsat telah disiplin waktu dengan pekerjaan dan					

No.	Keterangan	SS	S	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
	bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.					
5.	Tempat dan fasilitas yang tersedia didalam samsat sudah terpenuhi.					
Kesadaran wajib Pajak (X2)						
6.	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara.					
7.	Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah.					
8.	Saya sering lupa mengalokasikan dan untuk pembayaran pajak.					
9.	Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak.					
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
10.	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.					
11.	Saya sering membayarkan pajak tepat pada waktunya.					
12.	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan.					
13.	Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor.					

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 2

TABULASI DATA RESPONDEN

No	Reformasi Administrasi Perpajakan					TOTAL
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	3	4	4	19
7	4	4	5	5	5	23
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	4	4	3	19
10	4	4	4	4	4	20
11	4	4	4	3	2	17
12	3	3	3	4	3	16
13	5	5	5	5	5	25
14	4	4	4	4	4	20
15	3	3	1	5	1	13
16	4	4	5	4	5	22
17	4	3	3	3	4	17
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	4	3	3	18
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	4	20
22	4	5	4	5	4	22
23	4	2	4	4	2	16
24	4	4	4	3	3	18
25	5	5	5	5	5	25
26	4	4	5	4	4	21
27	5	4	4	4	3	20
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	3	4	4	19
31	5	5	5	5	5	25
32	5	5	5	5	5	25
33	4	3	3	1	1	12
34	4	4	4	4	4	20
35	2	2	3	3	2	12
36	4	5	4	5	4	22
37	4	5	4	4	4	21
38	4	4	4	3	5	20
39	4	4	4	3	5	20
40	4	4	5	4	3	20
41	1	2	2	2	2	9

No	Kesadaran Wajib Pajak				TOTAL
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2
1	5	4	2	4	15
2	4	4	4	4	16
3	4	4	2	4	14
4	4	3	3	4	14
5	4	4	3	4	15
6	5	4	4	4	17
7	4	5	5	5	19
8	4	4	2	5	15
9	4	5	2	5	16
10	4	4	2	4	14
11	5	5	4	4	18
12	4	2	1	4	11
13	5	5	5	5	20
14	4	4	3	4	15
15	1	1	1	1	4
16	5	5	1	5	16
17	4	4	3	3	14
18	4	4	4	4	16
19	4	5	1	5	15
20	5	5	2	4	16
21	4	5	2	4	15
22	5	5	1	4	15
23	5	4	3	4	16
24	4	3	4	4	15
25	5	5	5	5	20
26	5	5	3	5	18
27	4	4	1	1	10
28	5	5	4	4	18
29	4	4	1	4	13
30	3	3	4	4	14
31	5	5	1	5	16
32	5	5	5	5	20
33	4	4	4	3	15
34	5	5	1	5	16
35	5	5	3	2	15
36	5	4	4	4	17
37	4	5	3	4	16
38	5	4	4	3	16
39	5	4	4	4	17
40	3	4	5	4	16
41	1	2	2	2	7

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

42	4	4	5	3	5	21
43	4	3	4	4	4	19
44	4	4	4	4	4	20
45	4	4	5	5	4	22
46	4	4	4	3	3	18
47	4	4	4	4	4	20
48	4	4	4	4	4	20
49	4	4	4	4	4	20
50	4	3	3	3	4	17
51	4	4	4	4	4	20
52	4	4	4	4	4	20
53	3	4	3	4	5	19
54	4	4	4	4	4	20
55	5	5	5	5	5	25
56	4	4	4	4	4	20
57	4	5	4	4	3	20
58	4	4	3	3	4	18
59	4	3	4	3	4	18
60	4	4	4	3	4	19
61	5	4	5	4	5	23
62	4	4	4	4	4	20
63	5	4	4	4	4	21
64	5	4	4	4	4	21
65	4	4	4	4	4	20
66	4	4	4	4	4	20
67	4	4	4	4	5	21
68	5	5	5	4	4	23
69	5	5	5	4	4	23
70	4	4	4	4	4	20
71	4	4	4	4	4	20
72	5	5	5	5	5	25
73	4	4	3	3	5	19
74	5	5	4	5	5	24
75	5	5	5	5	5	25
76	5	5	4	5	5	24
77	5	5	4	5	4	23
78	5	4	4	5	5	23
79	4	3	4	3	4	18
80	5	5	4	4	4	22
81	3	4	3	4	4	18
82	4	3	4	5	4	20
83	4	4	4	5	4	21
84	5	4	4	5	5	23
85	4	4	3	3	3	17
86	4	4	5	4	5	22
87	5	5	4	4	5	23
88	5	4	4	5	4	22
89	5	5	4	5	5	24

42	4	4	5	5	18
43	3	4	4	4	15
44	4	4	1	4	13
45	4	5	4	5	18
46	5	4	1	4	14
47	4	4	3	4	15
48	4	4	4	4	16
49	4	4	4	4	16
50	4	3	3	3	13
51	4	4	4	4	16
52	4	4	4	4	16
53	4	4	4	4	16
54	4	4	4	4	16
55	5	5	5	5	20
56	4	4	4	4	16
57	5	5	3	4	17
58	4	4	3	4	15
59	4	4	3	4	15
60	5	4	3	3	15
61	5	5	5	3	18
62	4	4	4	4	16
63	5	5	5	4	19
64	5	4	5	4	18
65	4	4	3	4	15
66	4	4	4	4	16
67	5	4	4	5	18
68	5	4	5	4	18
69	5	5	5	5	20
70	4	4	4	4	16
71	4	4	4	4	16
72	4	5	5	4	18
73	4	3	3	4	14
74	5	5	5	4	19
75	5	4	5	4	18
76	5	5	4	5	19
77	5	4	4	4	17
78	4	4	5	5	18
79	4	3	4	3	14
80	5	5	4	4	18
81	4	4	3	4	15
82	4	4	5	5	18
83	5	4	4	5	18
84	4	4	5	5	18
85	4	3	3	4	14
86	4	4	3	5	16
87	4	5	5	4	18
88	5	5	4	5	19
89	4	4	4	5	17

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

90	4	5	5	4	4	22
91	4	4	4	4	4	20
92	4	4	4	4	4	20
93	5	4	4	5	4	22

90	3	4	3	3	13
91	3	4	3	4	14
92	3	3	4	3	13
93	4	4	3	3	14

No	Kepatuhan Wajib Pajak				TOTAL
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y
1	4	4	4	3	15
2	4	4	4	4	16
3	4	4	4	2	14
4	4	4	4	2	14
5	4	4	4	3	15
6	4	4	4	4	16
7	5	5	4	4	18
8	5	5	5	3	18
9	4	5	4	4	17
10	4	4	4	2	14
11	4	5	4	4	17
12	5	4	5	1	15
13	5	5	5	5	20
14	4	4	4	4	16
15	1	1	1	4	7
16	5	5	5	1	16
17	3	4	4	4	15
18	4	4	4	4	16
19	5	5	4	1	15
20	4	5	5	2	16
21	4	5	5	1	15
22	5	5	5	2	17
23	4	4	4	4	16
24	4	4	4	4	16
25	5	5	5	5	20
26	5	5	5	5	20
27	4	4	4	1	13
28	5	5	5	5	20
29	4	4	4	2	14
30	4	4	4	4	16
31	5	5	5	1	16
32	5	5	5	5	20
33	4	1	1	1	7
34	5	5	5	1	16

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

35	3	4	3	5	15
36	5	4	4	5	18
37	4	3	4	4	15
38	3	4	4	4	15
39	4	4	5	5	18
40	4	4	4	5	17
41	2	2	2	2	8
42	4	4	3	4	15
43	4	4	4	4	16
44	5	4	5	1	15
45	5	5	5	5	20
46	4	4	4	2	14
47	4	4	4	1	13
48	4	4	4	3	15
49	5	5	4	2	16
50	4	4	5	3	16
51	4	4	4	3	15
52	4	4	4	4	16
53	5	5	5	4	19
54	4	4	4	4	16
55	5	5	5	5	20
56	4	4	4	4	16
57	4	4	4	4	16
58	4	4	4	3	15
59	4	4	3	3	14
60	4	4	4	4	16
61	4	4	4	5	17
62	4	5	4	3	16
63	4	4	4	5	17
64	5	4	4	4	17
65	4	4	4	3	15
66	4	4	4	4	16
67	5	4	5	4	18
68	5	5	5	5	20
69	4	5	4	5	18
70	4	4	4	4	16
71	4	4	4	4	16
72	5	5	5	4	19
73	4	4	4	3	15
74	4	4	5	4	17
75	5	5	4	3	17

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

76	5	4	5	5	19
77	5	4	5	4	18
78	4	4	5	4	17
79	4	3	4	4	15
80	5	4	5	4	18
81	4	3	4	3	14
82	4	5	4	4	17
83	5	4	5	4	18
84	4	3	5	4	16
85	4	4	4	3	15
86	4	4	5	4	17
87	5	5	4	5	19
88	4	4	5	4	17
89	5	5	4	4	18
90	4	5	4	4	17
91	4	4	4	4	16
92	4	4	4	5	17
93	4	4	4	4	16

Lampiran 3 : Hasil Uji SPSS

OUTPUT SPSS

1. Uji Validitas Data

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total_x1
X1.1	Pearson Correlation	1	.668**	.591**	.497**	.520**	.814**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	93	93	93	93	93	93
X1.2	Pearson Correlation	.668**	1	.548**	.525**	.559**	.826**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	93	93	93	93	93	93
X1.3	Pearson Correlation	.591**	.548**	1	.384**	.544**	.770**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	93	93	93	93	93	93
X1.4	Pearson Correlation	.497**	.525**	.384**	1	.465**	.733**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	93	93	93	93	93	93
X1.5	Pearson Correlation	.520**	.559**	.544**	.465**	1	.804**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	93	93	93	93	93	93
Total_x1	Pearson Correlation	.814**	.826**	.770**	.733**	.804**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	93	93	93	93	93	93

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Total_x2
X2.1	Pearson Correlation	1	.657**	.182	.425**	.720**
	Sig. (2-tailed)		.000	.081	.000	.000
	N	93	93	93	93	93
X2.2	Pearson Correlation	.657**	1	.195	.492**	.747**
	Sig. (2-tailed)	.000		.061	.000	.000
	N	93	93	93	93	93
X2.3	Pearson Correlation	.182	.195	1	.240*	.682**
	Sig. (2-tailed)	.081	.061		.020	.000
	N	93	93	93	93	93
X2.4	Pearson Correlation	.425**	.492**	.240*	1	.711**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.020		.000
	N	93	93	93	93	93
Total_x2	Pearson Correlation	.720**	.747**	.682**	.711**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	93	93	93	93	93

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Total_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.652**	.681**	.005	.713**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.959	.000
	N	93	93	93	93	93
Y.2	Pearson Correlation	.652**	1	.663**	.095	.766**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.363	.000
	N	93	93	93	93	93
Y.3	Pearson Correlation	.681**	.663**	1	.100	.777**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.338	.000
	N	93	93	93	93	93
Y.4	Pearson Correlation	.005	.095	.100	1	.585**
	Sig. (2-tailed)	.959	.363	.338		.000

	N	93	93	93	93	93
Total_Y	Pearson Correlation	.713**	.766**	.777**	.585**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	93	93	93	93	93

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Uji Reliabilitas Data

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	32.1505	20.368	.752	.905
X2	36.5376	20.621	.829	.827
Y	36.2151	23.975	.841	.835

3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters A,b	Mean	-.0009876
	Std. Deviation	1.13279618
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.069
	Negative	-.060
Test Statistic		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200c,d

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

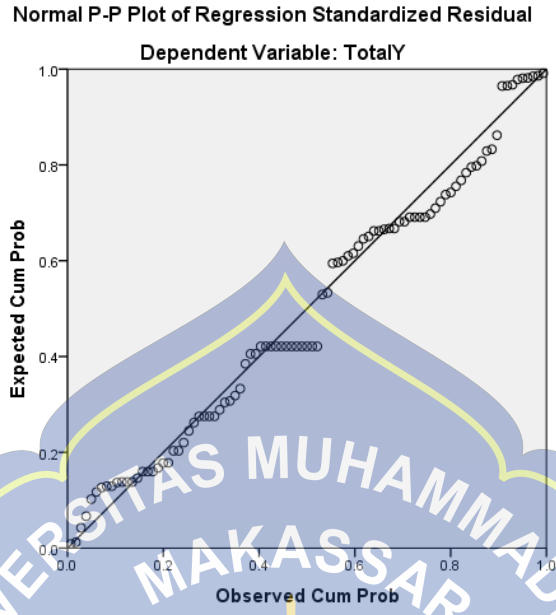

4. Uji Multikolinearitas

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.357	.891		3.766	.000		
	X1	.201	.062	.255	3.261	.002	.484	2.066
	X2	.553	.066	.655	8.383	.000	.484	2.066

a. Dependent Variable:Y

5. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.100	.570		1.930	.057
	X1	-.007	.039	-.029	-.189	.851
	X2	-.005	.042	-.016	-.108	.915

a. Dependent Variable: AbsRes

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 4 : Hasil Uji SPSS

1. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Berganda

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.357	.891		3.766	.000		
	X1	.201	.062	.255	3.261	.002	.484	2.066
	X2	.553	.066	.655	8.383	.000	.484	2.066

a. Dependent Variable: Y

b. Uji Koefisien Parsial (Uji T)

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.357	.891		3.766	.000		
	X1	.201	.062	.255	3.261	.002	.484	2.066
	X2	.553	.066	.655	8.383	.000	.484	2.066

a. Dependent Variable:Y

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.857[a]	.734	.728	1.12329

a. Predictors: (Constant),X2, X1
b. Dependent Variable:Y

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 5

T Tabel

Df	0,05	0,025		df	0,05	0,025
1	6.314	12.706		53	1.674	2.006
2	2.920	4.303		54	1.674	2.005
3	2.353	3.182		55	1.673	2.004
4	2.132	2.776		56	1.673	2.003
5	2.015	2.571		57	1.672	2.002
6	1.943	2.447		58	1.672	2002
7	1.895	2.365		59	1.671	2.001
8	1.860	2.306		60	1.671	2.000
9	1.833	2.262		61	1.670	2.000
10	1.812	2.228		62	1.670	1.999
11	1.796	2.201		63	1.669	1.998
12	1.782	2.179		64	1.669	1.998
13	1.771	2.160		65	1.669	1.997
14	1.761	2.145		66	1.668	1.997
15	1.753	2.131		67	1.668	1.996
16	1.746	2.120		68	1.668	1.995
17	1.740	2.110		69	1.667	1.995
18	1.734	2.101		70	1.667	1.994
19	1.729	2.093		71	1.667	1.995
20	1.725	2.086		72	1.666	1.993
21	1.721	2.080		73	1.666	1.993
22	1.717	2.074		74	1.666	1.993
23	1.714	2.069		75	1.665	1.992
24	1.711	2.064		76	1.665	1.992
25	1.708	2.060		77	1.665	1.991
26	1.706	2.056		78	1.665	1.991
27	1.703	2.052		79	1.664	1.990
28	1.701	2.048		80	1.664	1.990
29	1.699	2.045		81	1.664	1.990
30	1.697	2.042		82	1.664	1.989
31	1.696	2.040		83	1.663	1.989
32	1.694	2.037		84	1.663	1.989
33	1.692	2.035		85	1.663	1.988
34	1.691	2.032		86	1.663	1.988
35	1.690	2.030		87	1.663	1.988
36	1.688	2.028		88	1.662	1.987
37	1.687	2.026		89	1.662	1.987
38	1.686	2.024		90	1.662	1.987
39	1.685	2.023		91	1.662	1.986
40	1.684	2.021		92	1.662	1.986
41	1.683	2.020		93	1.661	1.986
42	1.682	2.018		94	1.661	1.986
43	1.681	2.017		95	1.661	1.985
44	1.680	2.015		96	1.661	1.985
45	1.679	2.014		97	1.661	1.985

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

46	1.679	2.014		98	1.661	1.984
47	1.678	2.013		99	1.660	1.984
48	1.677	2.012		100	1.660	1.984
49	1.677	2.011		101	1.660	1.984
50	1.676	2.010		102	1.660	1.983
51	1.675	2.008		103	1.660	1.983
52	1.675	2.007		104	1.660	1.983

Lampiran 6

R Tabel

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880

27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432
df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018

63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Lampiran 7 : Surat Penelitian

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1112/05/C.4-VIII/III/1444/2023 — 08 Ramadhan 1444 H
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal — 30 March 2023 M
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di –
Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 467/05/A.2.II/III/44/2023 tanggal 30 Maret 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **RINA SANTIKA**
No. Stambuk : **10573 1103319**
Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
Jurusan : **Akuntansi**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT GOWA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 April 2023 s/d 3 Juni 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan,MP.
NBM 1017716

03-23

Lampiran 8 : Surat Penelitian

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **15960/S.01/PTSP/2023**
Lampiran : -
Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Gowa
di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1112/05/C.4-VIII/III/1444/2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **RINA SANTIKA**
Nomor Pokok : 105731103319
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***28 APril s/d 03 Juni 2023***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 28 April 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 9 : Surat Balasan Penelitian

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN WILAYAH GOWA
Jl. Tumanurung No.17 No. Telp (0411) 886785
Sungguminasa

Sungguminasa 11 Mei 2023

Nomor : 973/1166/UPTP-GOWA/V/2023
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada
Yth. **Bapak/Ibu**
di –
Tempat

Dengan Hormat,

Membalas Surat Bapak/Ibu Nomor : 503/521/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2023, maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa pada prinsipnya kami bersedia menerima mahasiswi Bapak/Ibu untuk melakukan penelitian yang berjudul **"PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOTR (*Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa)*"** di UPT Pendapatan Wilayah Gowa, mulai 28 April 2023 s/d 03 Juni 2023

Nama : **RINA SANTIKA**
Program Studi : AKUNTANSI
Nomor Pokok : 105731103319
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswi (S1)

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA UPT PENDAPATAN WIL. GOWA

UPT PENDAPATAN Wil. GOWA

WAHYUNI AMIR, S.Sos
Pangkat : Pembina
NIP. 19710607 199203 2 008

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 10 : Dokumentasi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 11: Surat Keterangan Bebas Plagiat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin N0.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Rina Santika
NIM : 10573110331919
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 Juni 2023
Mengetahui
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Lampiran 12: Hasil Uji Plagiasi

BAB I

BAB II

BAB II Rina Santika 105731103319

ORIGINALITY REPORT

23%	24%	9%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unej.ac.id Internet Source	3%
2	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
5	ejournal.bsi.ac.id Internet Source	2%
6	ejournals.umma.ac.id Internet Source	2%
7	ocs.unud.ac.id Internet Source	2%
8	id.scribd.com Internet Source	2%
9	pusdansi.org Internet Source	2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
LULUS
turnitin

BAB III

BAB III Rina Santika 105731103319
ORIGINALITY REPORT
9%
SIMILARITY INDEX
11%
INTERNET SOURCES
10%
PUBLICATIONS
9%
STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES
1
www.journals.segce.com
Internet Source
5%
2
Submitted to Universitas Airlangga
Student Paper
5%
Exclude quotes
Exclude bibliography
Exclude matches
LULUS
Turnitin
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV

BAB IV Rina Santika 105731103319
ORIGINALITY REPORT
9% SIMILARITY INDEX
13% INTERNET SOURCES
2% PUBLICATIONS
8% STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES
1 e-journal.stie-aub.ac.id Internet Source 3%
2 jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source 3%
3 Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper 2%
4 www.docstoc.com Internet Source 2%
Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches 2%
LULUS
turnitin
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V

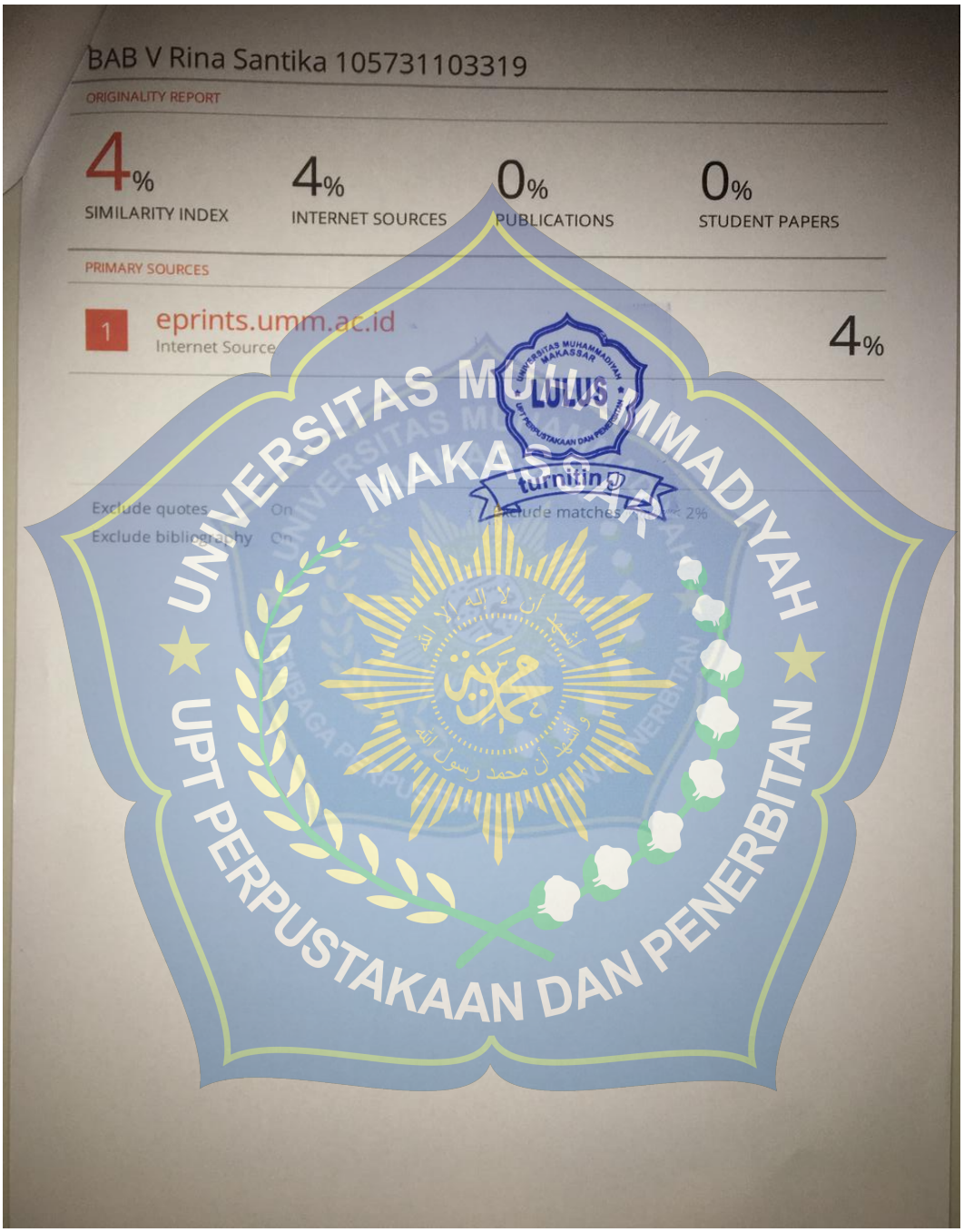
BAB V Rina Santika 105731103319
ORIGINALITY REPORT
4%
SIMILARITY INDEX
4%
INTERNET SOURCES
0%
PUBLICATIONS
0%
STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES
1
eprints.umm.ac.id
Internet Source
4%
LULUS
turnitin
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BIOGROFI PENULIS

RINA SANTIKA adalah penulis skripsi ini. Penulis lahir di Liukang Loe pada tanggal 02 Juni 2000 dari pasangan suami istri Bapak almarhum Kamran dan Ibu Sanawati. Penulis merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Penulis berasal dari Bira, Kecematan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba dan selama menempuh Pendidikan di perguruan tinggi penulis bertempat tinggal di jalan Nuri Bonto-bontoa, Kecematan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Adapun jenjang pendidikan yang penulis tempuh yaitu SDN 170 Liukang Loe lulus tahun 2013, SMPN Satap 6 Bulukumba lulus tahun 2016, SMAN 1 Bulukumba lulus tahun 2019. Setelah penulis menempuh Pendidikan selama 12 tahun, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN